

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan No. 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)



OLEH

ARI MENTARI

B111 11 004

BAGIAN HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan No.90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)

Oleh:

ARI MENTARI

B111 11 004

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No.90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

ARI MENTARI
B111 11 004


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 01 Juni 2015
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 19680411 199203 1 003


Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

A.n Dekan
Pembantu Dekan 1,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
Nip. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ARI MENTARI

No.Pokok : B11111004

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan
Nomor 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)

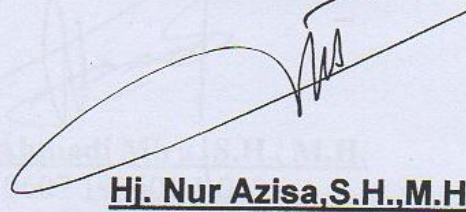
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 30 Maret 2015

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H

Pembimbing II


Hj. Nur Azisa, S.H., M.H

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **ARI MENTARI**

Nomor Pokok : B 111 11 004

Bagian : Hukum Acara

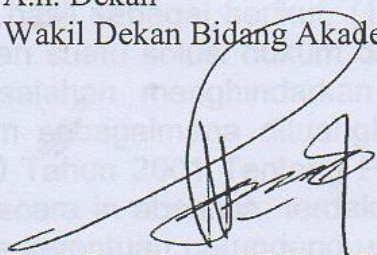
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERDILAN *IN ABSENTIA*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No.90/Pid.Sus.TPK/
2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2015

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 1961 0607 198601 1003

ABSTRAK

“Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan (Studi Kasus Putusan No:90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)” karya Ari Mentari (B 111 11 004), di bawah bimbingan Prof Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peradilan in absentia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui relevansi dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam pelaksanaan putusan in absentia dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Negeri Makassar adapun data-data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dengan para Hakim setempat serta melalui penelitian kepustakaan.

Peradilan adalah kekuasaan negara guna menegakkan hukum dan keadilan memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain; beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana sebagai berikut : (1). Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; (2). Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence); (3). Asas Oportunitas (4). Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum; (5). Semua Orang Diperlakukan Sama Didepan Hukum; (6). Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan Tetap; (7). Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum; (8). Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan dimana pada Proses pemeriksaan pidana dimulai pada penentuan hari sidang dan pemanggilannya hingga jenis pemeriksaan seperti pemeriksaan cepat, pemeriksaan singkat, dan atau pemeriksaan Biasa. Tentang Hakikat Peradilan In Absentia dalam peraturan perundang-undangan serta Hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa dapat pula dijelaskan pada penjabaran penulis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1). Peradilan secara in absentia pada hakikatnya dapat dijadikan suatu solusi hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dengan permasalahan menghindarkan diri dari penuntutan sehingga memberikan kepastian hukum sebagaimana dituangkan dalam UU No.31 Tahun 1999 yang diperbarui UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2). Dalam peradilan secara in absentia, terdakwa tetap memiliki hak pembelaan di persidangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan tetapi karena ketidak-hadirannya terdakwa dianggap mengabaikan hak pembelaannya sebagai konsekuensi in absentia pada proses pemeriksaan sidang pengadilan demi menjaga prinsip peradilan cepat juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hak-haknya sebagai individu.

KATA PENGANTAR

Alhamduillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan izin-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.sus.TPK/2013/PN.Mks)” sebagai ujian akhir program studi Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rampungnya Skripsi ini, Penulis persembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda Alm. Baharuddin dan ibunda Baharia yang telah melahirkan dan yang tidak pernah bosan membesarkan, mendidik serta mendoakan penulis dan terima kasih kepada kakak sepupu saya Hj. Kartini dan suaminya H. Syamsul Rijal yang telah banyak sekali memberikan bantuan selama saya duduk di bangku SMP sampai penyelesaian skripsi ini, tante saya Hj. Hamsiah Dg Pajja dan Askiah Dg Te'ne dan kakak satu-satunya Mardianti, S.E dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih juga buat keponakan saya Rini Aprianti s.rijal dan Aurelia Nadhifa Maharani yang cukup memberikan andil dalam penyelesaian skripsi Penulis. Dan dari lubuk hati penulis dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu** selaku Rektor Unhas

2. Ibu **Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I, dan Bapak **Dr. Syamsuddin MuchtarSH., M.H** sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Hamzah Halim S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof Dr. Slamet Samporno,S.H.,M.H** dan ibu **Hj. Nur Azisah,S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
5. Bapak **Prof. Dr., Syamsul Bachri, S.H., M.S.**, Selaku Penasehat Akademik atas segala bimbingannya dan perhatiannya yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Seluruh staf dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Terima kasih juga untuk orang tua Sarpatih Saputri papi Emil Hakim dan Mami Diana yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis Sarpatih Saputri, Irma Pebrianti, Asam Jafar, Andi Rachmi Dwi Putri dan Andi Batari Toja.

10. Serta terima kasih banyak buat Noni Paramita Sudarli, Yunus, Edhi Labelo dan Muh. Takbir yang telah banyak membantu dalam kesuksesan skripsi penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Iis Ariska, Wahdaningsih, Linda, Kiki, Haedar, Mamet, Helvi, Ulfa dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya selama ini karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Sahabat-sahabat SMA Negeri 1 Galesong Utara, St Risma Ayu Nirwana, Munadiah, Risnawati, Rismawati R, Ardiansyah Putra dan Iis Ariska yang telah membantu dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Gelombang 87 Universitas Hasanuddin di Desa Cakkebone kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sarpatih Saputri (Patio), Noni Paramita Sudarli (Nino), Lala Manganjito (Lalapoo), Andi Mulyono Assam (kak Ono), Arif Chairawan (kak Agam), dan Syahrul Rauf (kak Arul).
14. Pengadilan Negeri Makassar yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

Dan seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Makassar, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peradilan dan Asas-Asasnya.....	9
B. Pengertian Peradilan In Absentia.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	30
3. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	36
E. Ketentuan Umum Proses Peradilan Pidana.....	38

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	38
2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	48
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	65
B. Jenis dan Sumber Data	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Analisis Data	66
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peradilan <i>In Absentia</i> dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia dikaitkan dengan Hak-Hak Terdakwa	68
B. Relevansi Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Proses Pemeriksaan Perkara dengan Hak Terdakwa untuk melakukan Pembelaan	98
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) dilandasi pemikiran bahwa korupsi sudah sangat akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan berbangsa, sehingga dalam pemberantasannya tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dan menggunakan cara-cara konvensional , melainkan diperlukan metode dan cara tertentu yaitu dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).¹ Hal ini dikarenakan karakter korupsi sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).²

¹Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, LN No. 137, TLN No. 4250, Penjelasan Umum.

² Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum tentang Kriminialisasi Pengembalian Aset Kejaksaan Internasional dalam Konvensi PBB*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hal.1.

Dengan mempertimbangkan kerugian hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat korupsi, UU TPK memuat berbagai ketentuan yang semangat terbesarnya dapat disimpulkan adalah untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang bersifat materil, disamping mencantumkan ketentuan ancaman pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera pada pelakunya. Dengan demikian, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dan sasaran utama para pembentuk undang-undang dalam perumusan undang-undang pemberantasan korupsi melalui upaya sekeras-kerasnya untuk mengembalikan uang Negara yang telah dikorupsi yang kemudian oleh Negara dimanfaatkan untuk pemulihan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Salah satu upaya dimaksud adalah peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (*peradilan in absentia*). Peluang dilaksanakan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU TPK, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya." Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU TPK dapat diketahui bahwa maksud dari ketentuan mengenai peradilan *in absentia* adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, terdakwa dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim.

³ Edy Wibowo, peranan Hakim dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, (Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.279 Februari 2009), hal 49

Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara *In absentia* yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim. Namun di sisi lain, KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan dimuka pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya.⁴ Prinsip pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Hal ini juga diatur dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda

⁴ Lihat pasal 154 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.⁵

Pada praktiknya upaya menyidangkan terdakwa perkara korupsi secara *in absentia* bukanlah suatu hal yang baru sejak tahun 2002, terdapat 6 (enam) perkara korupsi yang diperiksa dan diputus secara *in absentia* dan kesemuanya merupakan perkara korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardjo, Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian diadili secara *in absentia* ketika ketiganya melarikan diri ke luar negeri. Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan dalam perkara BLBI Bank Surya diadili secara *in absentia* ketika bersangkutan berada di Singapura.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK, terdapat beberapa perkara dimana tersangkanya melarikan diri yaitu antara lain Anggoro Widjojo dalam perkara penyuapan terkait pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang menjadi buronan sejak juni 2008. Kondisi ini mengakibatkan penanganan perkara tersebut mengambang dan tidak jelas di tingkat penyidikan. Perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut mengalami kesulitan ketika akan

⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 89

diproses lebih lanjut karena menunggu tertangkapnya “tersangka utama”. Selain itu, harta benda yang diduga berasal dari perbuatan korupsi yang telah dilakukan tidak jelas statusnya karena belum ada ketetapan hukumnya.

Perasaan keadilan masyarakat yang menuntut ditegakkannya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berhadapan dengan kenyataan bahwa pelaku tindak pidana korupsi memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah selama belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*) melalui *due process of law*, padahal apabila mengacu pada pendapat Loebby Loqman, UU TPK pada prinsipnya mempunyai tujuan prevensi untuk melindungi harta kekayaan/perekonomian negara. Tujuan represifnya disamping untuk melakukan pemidanaan bagi mereka yang melakukan korupsi juga untuk menyelamatkan harta kekayaan negara. Dalam perkara korupsi, perlindungan serta penyelamatan terhadap harta kekayaan negara menjadi prioritas utama⁶

Dalam perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada akhir-akhir ini, muncul fenomena yang berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan dikarenakan terdakwa melarikan diri. Hal ini menimbulkan kebuntuan dalam upaya penanganan dalam upaya

⁶ Loebby Loqman, Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 1996), hal 49

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dalam hal pelaksanaan baik dilakukannya eksekusi dan terganggunya proses peradilan dan penanganan perkara lain yang berkaitan langsung dengan ara tersebut.

Pembahasan mengenai peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi menarik untuk dicermati dikarenakan maksud dari ketentuan mengenai peradilan *in absentia* adalah selain menyelamatkan kekayaan negara juga ditinjau dari bagaimana cara pelaksanaannya karena ketidakhadiran terdakwa. Kalau di tinjau dari menyelamatkan kekayaan negara yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak social dan ekonomi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi masih belum menyentuh tujuan utama tersebut terutama dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Di sisi lain walaupun kita tinjau dari ketidakhadiran terdakwa dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* dihadapkan dengan prinsip bahwa kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk memberikan ruang kepada hak-hak terdakwa sebagai manusia.

Akan tetapi, persoalan penerapan peradilan *in absentia* memerlukan adanya perhatian dan tinjauan khusus yang betul-betul rinci agar diperoleh kebenaran dan kepastian baik dari segi legitimasi yuridis, hal-hal yang biasa di *in absentia* kan, kendala dalam pelaksanaan putusan sampai dengan

efektifitasnya *in absentia* sebagai sebuah solusi, mengingat beragamnya bentuk dan jenis persoalan untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat serta ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Studi Kasus Putusan No: 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam hubungannya dengan hak-hak terdakwa?
2. Bagaimanakah relevansi peradilan *in absentia* dalam proses pemeriksaan perkara dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peradilan dengan hubungannya dengan hak-hak terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah relevansi peradilan *in absentia* dalam proses pemeriksaan perkara dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, utamanya penegak hukum diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan kedepan agar supremasi hukum dapat ditegakkan.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana hukum positif kita mengatur mengenai peradilan *in absentia* yang menjadi solusi terhadap terdakwa secara nyata menghindarkan diri dari penuntutan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan pemahaman mengenai peradilan secara *in absentia*.
4. Sebagai bahan literature bagi para pembaca dan sebagai masukan para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini;
5. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peradilan dan Asas-Asasnya

Peradilan adalah kekuasaan negara guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain; dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁷

Beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

⁷ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal 11

Untuk menunjukkan system peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Dalam HIR , misalnya Pasal 71 dikatakan, bahwa jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Pencantuman peradilan cepat (*contante justice; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman tersebut.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur , dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*)

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. Asas oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi “jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”

Dalam praktik , penerapan asas oportunitas itu dapat dilekatkan syarat-syarat. Di negeri Belanda di mana dianut juga asas oportunitas menurut Pasal 167 ayat (2) Ned.Sv., tidak dengan tegas diatur tentang kemungkinan dilekatkannya syarat-syarat pada penerapan asas itu. Namun dalam praktik, hal itu sering diterapkan oleh penuntut umum sebagai hukum tidak tertulis.

Di Indonesia pun dalam hal *schikking* perkara-perkara penyelundupan yang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tidak diatur, dipakai dasar hukum asas oportunitas (Pasal 32c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia) dan dilekatkannya syarat-syarat penseponeran, yaitu

pembayaran denda damai yang disetujui antara pihak kejaksaan dan tersangka.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (ayat (3)).

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat (4)).

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualian yang lain selain dari yang tersebut diatas. Pasal 104 UUDS 1950 ayat (2) dan (3) menunjuk kekecualian seperti diatas. Ayat (2) dan (3) mengatakan sebagai berikut:

Lain daripada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum hanya boleh menyimpang dari peraturan ini. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

5. Semua Orang Diperlakukan sama di Depan Hakim

Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi:

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Ini berarti pengambilan keputusan salah satunya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara ini. Disebut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 31.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *the international Covenant an Civil and Political Rights article 14 sub 3d* kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan berikut:

Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasehat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasehat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan

peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayarannya.

Dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka-terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir/dan Inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal maka asas inkisitor ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri beradab. Selaras dengan itu, berubah pula system pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan digantri dengan “keterangan terdakwa”, begitu pula penambahan alat bukti yang langsung dan lisan.

9. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh

kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan , artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal diatas diatur dalam pasal-pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya.

Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 213 KUHAP). Dalam KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Begitu pula ketentuan dalam pasal 214 KUHAP yang mengatur acara pemeriksaan verstek itu.

Dalam hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.⁸

B. Pengertian Peradilan *In Absentia*

In absentia istilah dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Dalam istilah hukum, menurut Abdul Rahman Saleh, bahwa:

⁸ *Ibid.*, hal 12-16

“konsep peradilan *in absentia* adalah konsep dimana terdakwa telah di panggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.”⁹

Mengadili dan menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa hadirnya oleh terdakwa itu sendiri. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin *in absentia* atau *absentium* yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau “ketdakhadiran”. Dalam bahasa prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa inggris *absent* atau *absentee*.¹⁰

Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa. Istilah yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan “*in absensia*” sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) yang menyatakan:”apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*)”

⁹ Abdul Rahman Saleh, bukan kampung maling, bukan desa ustazd. Jakarta: Kompas media nusantara, 2008, hal 208

¹⁰ Andi Hamzah, hukum pidana ekonomi. Jakarta: erlangga, 1986, hal 98

Istilah *in absentia* pada perkembangannya tidak lagi disebut dalam berbagai produk legislasi, tetapi diatur dengan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung arti suatu proses pemeriksaan dan mengadili seseorang atau beberapa orang terdakwa di depan sidang pengadilan dan penjatuhan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Seorang terdakwa dapat dijatuhi hukum pidana oleh hakim di pengadilan dalam suatu proses pengadilan *in absentia*.¹¹

Secara umum peradilan *in absentia* lazim diterapkan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam perkara pidana umumnya mengkehendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP yang menyatakan bahwa:” Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”

¹¹ *Ibid.*, hal 6

KUHAP tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai peradilan *in absentia*, baik di dalam ketentuan pasal-pasal maupun penjelasannya. Namun di dalam pasal 196 ayat (1) dan pasal 214 (1) dan (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) *Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.*

Pasal 214

- (1) *Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.*
(2) *Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.*

Secara yuridis formal, peradilan *in absentia* hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara *in absentia* yaitu:

- (1) Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962.
- (2) Tindak Pidana Pencucian uang berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- (3) Tindak Pidana Terorisme berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
- (4) Tindak Pidana Perikanan berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan
- (5) Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU TPK.

Terhadap tindak pidana korupsi, sebenarnya peradilan *in absentia* telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bunyi pasal 23 ayat (1) yaitu: "jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya." Dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan pasal 26 UU TPK yang menyatakan bahwa: "penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa: "terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

korupsi". Jadi apabila terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang sah atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peridangan perkara korupsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).¹²

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kekayaan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut R.Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: "sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan bahwa supaya suatu perbuatan mana diadakan perbuatan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencakupi syarat-syarat yaitu:

¹²*Ibid.*, hal 12

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-Undang.¹³

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari atas unsur-unsur lahir oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana. Biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu:

¹³ R.Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hal 28

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
 - 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
 - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP.

- 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Berdasarkan perumusannya

- Delik formil dan delik materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhtaikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Tindak pidana materil inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu , siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang , dan bukan dari wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan

¹⁴ Simorangkir, J.C.T, Kamus hukum. Jakarta: sinar grafika, 2000, hal 161

pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu pula dengan selesainya tindak pidana materill, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan , tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

b. Berdasarkan kesalahannya

- Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

c. Berdasarkan cara melakukannya

- Delik commisionis dan Delik Omisionis

Tindak pidana aktif (commisionis) adalah tindak pidana berupa perbuatan aktif (disebut perbuatan materill) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota dari tubuh dari orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif (Omisionis) adalah dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang

dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu , ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

d. Berdasarkan jangka waktu terjadinya

- Delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus

Tindak pidana yang berlangsung seketika adalah misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Tindak pidana terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voorctderende delicten* seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama , dan akan terhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan.

e. Berdasarkan sumbernya

- Delik umum dan delik khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun setelah ada kodifikasi (KUHP) , tetapi

adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari.¹⁵

D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian tindak pidana korupsi

Pengertian dari definisi atau pengertian korupsi oleh ahli hukum berbeda-beda. Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri yang dimana penafsiran dari definisi atau pengertian korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap definisi ataupun pengertian korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan dari definisi atau pengertian korupsi oleh beberapa ahli dan undang-undang.

Nurdjana mengemukakan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corupstio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Kata korupsi berasal dari bahasa yunani latin "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materiil, mental, dan hukum.¹⁶

¹⁵ Evi Hartanti, S.H. Tindak pidana korupsi. Jakarta: sinar grafika, 2012, hal 7-9

¹⁶ Nurjdana, IGM, korupsi dalam praktek bisnis pemberdayaan penegak hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2005, hal 7-8

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.

Korupsi dalam kamus ilmiah populer karya Partantanto Al Barry mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, pemalsuan.¹⁷

Pengertian korupsi menurut pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

¹⁷ Partantanto Al Barry, kamus ilmiah populer, Surabaya: Arkola, 1994, hal 10

- b. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pengertian korupsi menurut pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- i. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- ii. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁸

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan adalah:

¹⁸ Undang-undang No 1 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Tindakan melawan hukum;
- 2) Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 3) Merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Dilakukan oleh pejabat public/penyelenggara Negara maupun masyarakat.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana dari segi hukum, adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum,
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana,
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,
- 4) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian,
- 5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- 6) Penggelapan dalam jabatan,
- 7) Pemerasan dalam jabatan,
- 8) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/ penyelenggara Negara),
- 9) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri / penyelenggara Negara).

¹⁹ Kurniawan, L (ET AL) , menyingkap korupsi di daerah, Jakarta : Indonesia corruption watch, 2003, hal 15

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²⁰

2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi

Instrument hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah Pada korupsi termasuk tindak pidana korupsi itu sendiri telah cukup lengkap. Instrument tersebut berupa peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud untuk difungsikan dan dioptimalkan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan Negara.

Melihat pengertian di atas maka korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis dan tipologi. Hal ini dipertegas syed Husain dalam buku IGM, Nurdjana, tipologi antara lain:

²⁰*Opcit.*, hal 8

- a. Korupsi transaksi, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.
- b. Korupsi perkerabatan, jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta krooni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras, biasanya korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal demikiannya.
- d. Korupsi insentif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.
- e. Korupsi defensive, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik, korupsi yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain ataupun pihak lain terlibat didalamnya.
- g. Korupsi suportif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan.²¹

²¹ Nurdjana, IGM, korupsi dalam praktek bisnis pemberdayaan penegak hukum, program aksi dalam strategi penanggulangan masalah korupsi. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal 72-74

Jenis korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam pasal 2-pasal 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 adalah:

- a. Discretionary Corruption adalah korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
- b. Illegal Corruption adalah tindakan dalam menentukan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud hukum.
- c. Mercenary Corruption adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
- d. Ideological Corruption adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan social, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesenjangan social ekonomi, masalah struktur atau system ekonomi, masalah system/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan public. Jadi, kausa dan kondisi

yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi) , yaitu bias dibidang moral, social, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi atau administrasi.

- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian Negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan atau kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime* dan bahkan *transnational crime*.
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk top hat crime), maka di dalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan politisasi proses peradilan pidana.²²

Bila diperhatikan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik beberapa asas

²² Undang-Undang No 32 Tahun 1999 (pasal 2-12)

yang tercakup di dalamnya yang dapat membedakannya dengan undang-undang tindak pidana lainnya, asas-asas tersebut menurut Darwin Prints diantaranya adalah:

- a. Pelakunya adalah setiap orang.
- b. Pidananya bersifat kumulasi dan alternative.
- c. Adanya pidana minimum dan maksimum.
- d. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi sama hukumannya dengan delik yang sudah selesai.
- e. Setiap orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan sehingga dapat terjadi tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- f. Mempunyai pidana tambahan selain yang diatur KUHP misalnya seperti:
 - 1) Perampasan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
 - 2) Pembayaran uang ganti rugi yang jumlahnya maksimal dengan harga yang diperoleh dari tindak korupsinya.
 - 3) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

- g. Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang.
- h. Dapat dibentuk Tim Gabungan di bawah koordinasi jaksa agung.
- i. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang.
- j. Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai tindak pidana korupsi maka dapat dipidana.
- k. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- l. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya.
- m. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum / Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka.
- n. Identitas pelapor dilindungi.
- o. Dapat dilakukan gugatan perdata.
- p. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.
- q. Ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana korupsi dapat digugat untuk menuntut kerugian Negara.

- r. Dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan pembuktian terbalik.
- s. Dapat diadili in absentia.
- t. Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- u. Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan.
- v. Adanya peran serta dari masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.²³

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Hubungan antar manusia yang ditentukan oleh hukum yang lazim disebut hubungan hukum yang melakukan hubungan hukum yang disebut sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dari pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Menurut kamus hukum seorang atau person adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Penulis hanya membahas yang dilakukan oleh seseorang perseorangan yang dalam memangku suatu jabatan atau kedudukan untuk mencari keuntungan atau

²³ Darwint Prints, tindak pidana suap dan *money politic*. Medan:pustaka bangsa press, 2002,hal 23-27

untuk memperoleh dan menambah kekayaan dari yang sudah ada dengan cara melawan hukum. Adapun yang termasuk person di atas adalah:

1. PNS, yang tunduk dalam undang-undang No.8 Tahun 1974 (Tentang Kepegawaian), ABRI, PNS, lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya BUMN,BUMD.
 2. Yang diatur dalam pasal 92 KUHP (anggota DPR,DPRD, Hakim).
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
 4. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.
- b. Korporasi

Korporasi juga merupakan subjek hukum karena korporasi juga pendukung hak dan kewajiban, adapun yang dimaksud dengan korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan Badan Hukum.

Badan hukum menurut Kamus hukum adalah perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat

memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya, contohnya Yayasan, PT dan sebagainya.²⁴

E. Ketentuan Umum Proses Peradilan Pidana

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam menghadapi suatu perkara pidana, kita diharuskan menghadapi sejumlah rangkaian pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga penjatuhan vonis oleh Hakim. Demi teraturnya proses hukum tersebut, kemudian dipandang perlu untuk melahirkan sebuah aturan khusus yang menjelaskan mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati agar tidak melanggar hak asasi manusia dalam pemeriksaan perkara utamanya dalam menjamin hak-hak para tersangka dan melindungi korban kejahatan.²⁵

Untuk itu pemerintah kemudian menerbitkan UU.Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

²⁴ Moch. Faisal Salam, S.H., M.H. Hukum acara pidana dalam teori dan praktek. Bandung : mandar maju, 2001, hal 156

²⁵ Evi Hartanti, tindak pidana korupsi. Jakarta : sinar grafika, 2012, hal 43

Berdasarkan KUHAP tersebut, proses pemeriksaan suatu perkara pidana kemudian dibagi atas tahap-tahap berikut:

a Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan disebut penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 4 KUHAP). Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).

Pasal 5 ayat (1) KUHAP mengatakan “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berikut karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
6. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
8. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan selanjutnya disebut penyidik.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).

Dalam pasal 7 KUHAP diatur bahwa penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penegenal dirinya.
4. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan pengentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penangkapan oleh penyidik dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi (pasal 17 KUHAP). Setelah itu penyidik dapat mengeluarkan perintah penahanan jika dikhawatirkan Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat 1 KUHAP), dan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu menurut pasal 8 ayat (1) KUHAP mengatur pula bahwa penyidik:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya dalam pasal 75 KUHAP (1) menjelaskan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

1. Pemeriksaan Tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.
5. Pemasukkan rumah.
6. Penyitaan benda.
7. Pemeriksaan surat.
8. Pemeriksaan saksi.
9. Pemeriksaan ditempat kejadian.
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana (pasal 106 KUHP). Untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik Polri wajib memberi petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Pemeriksaan saksi dan tersangka pada tahap penyidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi dan tersangka tidak disumpah.
2. Tersangka dapat meminta saksi yang menguntungkan.
3. Keterangan diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
4. Keterangan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani.

Pemeriksaan dapat dilakukan diluar daerah hukum penyidik jika tersangka atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik jika tersangka atau saksi

dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka atau saksi tersebut (pasal 119 KUHP).

Jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pendapat orang ahli/keterangan ahli agar tindak pidana yang terjadi bias terungkap lebih jelas.

Jika dalam kegiatan penyidikan tersebut tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (pasal 76,77,78 KUHP), maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga.²⁶

b Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputuskan di sidang pengadilan.

Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir 6a KUHP).

²⁶ M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: sinar grafika, 2012; hal 132

Wewenang penuntut umum dalam pemeriksaan perkara pidana diatur dalam bab IV KUHAP pasal 14 yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penuntutan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Membuat surat dakwaan.
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
6. Melakukan penuntutan.
7. Menutup perkara demi kepentingan umum.
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
9. Melaksanakan penetapan Hakim.

Dari perincian wewenang dalam Pasal 14 tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum tidak dapat melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa meskipun dalam perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya kecuali dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi dan lain sebagainya.²⁷

c Pemeriksaan sidang pengadilan

²⁷ *Ibid.*, hal 364

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan terdapat tiga macam acara pemeriksaan.

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat yang terdiri atas:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan

Secara umum, tata cara pemeriksaan perkara di muka pengadilan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terdakwa oleh yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang diawali dengan menanyakan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.
2. Eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukum.
3. Perlawanan terhadap putusan eksepsi.
4. Pembuktian /pemeriksaan alat-alat bukti.
5. Penuntutan oleh penuntut umum.
6. Pembelaan (pledoi) terdakwa / penasehat hukum.
7. Penjatuhan / pembacaan putusan pengadilan oleh hakim.²⁸

d Upaya hukum

²⁸*Ibid.*, hal 315

Setelah pembacaan putusan oleh hakim, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi upaya hukum terdiri atas tiga jenis yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yang terdiri atas:

a. Perlawanan / verzet

Pada dasarnya, perlawanan/ verzet hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk Hakim/Majelis Hakim, putusan dimana pokok perkara belum diperiksa.

b. Banding

Upaya hukum banding dilakukan sebagai suatu pengujian atas ketepatan putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya.

c. Kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan lain dan bukan merupakan “peradilan tingkat ketiga”, sebab pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi hanya

dapat memeriksa mengenai; apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (Pasal 235 ayat (1) huruf a,b,c, KUHAP).

2. Upaya hukum luar biasa,

Yakni peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bab XVII Bagian kedua pasal 263-269 KUHAP , Pasal 21 UU No.35/1999 dan Pasal 20 UU No.3/1997.

Pada dasarnya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa ini memiliki tujuan yang sama ,yakni untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Akan tetapi dalam prakteknya ada perbedaan yang mendasar pada kedua upaya hukum ini, yaitu:

- a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu.²⁹

3. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001

a. Pembuktian Terbalik

Selanjutnya didalam rumusan ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf (a) terlihat bahwa gratifikasi mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian. Kemudian Pasal 12 C menyatakan apabila si penerima melaporkan gratifikasi kepada komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku.

Didalam rumusan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur, bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan

²⁹ Lilik Mulyadi, hukum acara pidana (suatu tunjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan). Bandung : PT. citra aditya, 1996, hal 144-157.

oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Mengacu pada rumusan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pasal ini merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Selanjutnya diketahui bahwa didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) merupakan ketentuan yang bersifat *premium remedium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi, perluasan terhadap alat bukti atau bukti petunjuk perlu dilakukan sehingga akan lebih efektif, artinya si terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, suami,

anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga oleh jaksa penuntut umum mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal dugaan, dimaksud adalah diadakan penegasan perihal bukti permulaan yang cukup, yang akan berdampak pada perlunasan terhadap alat bukti petunjuk.

Meskipun demikian, apabila dalam gratifikasi, terdakwa berhasil membuktikan bahwa pemberian yang didapat bukan mempunyai unsur korporasi, maka pembalikan beban pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai suatu dasar bagi hakim memutus perkara tersebut bahwa dakwaan tidak terbukti. Dalam pembalikan beban pembuktian oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim memiliki alasan yang cukup dan meyakinkan untuk memutuskan perkara tersebut.

Di samping itu juga pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi bukan berarti mengabaikan asas peradilan yang *fair* dan tidak memihak (*impartial*).

Selain itu juga harus diperhatikan, bahwa idealnya didalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi juga harus didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa, sistem pengawasan terhadap lembaga atau badan-badan peradilan yang efektif. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan internal dan eksternal. Mekanisme

pengawasan eksternal maupun internal harus memiliki daya dukung yang kuat serta partisipatif dalam kerangka *social control* terhadap badan peradilan, hal ini dimaksudkan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.³⁰

Pembuktian terbalik adalah suatu beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan di muka persidangan apakah dirinya benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan setidaknya, sehingga dalam hal ini setiap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/D atau mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya. Wajib membuktikan sah kekayaan yang diperolehnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 A, 38 A, dan 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang masing-masing mengatur bahwa:

Pasal 37 A mengatur bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undan Nomor 20 Tahun 2001

benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 14, pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penutup umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A mengatur bahwa:

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas oleh Negara.

3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulang pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Selanjutnya, didalam perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus, salah satunya dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan hasil korupsi. Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenai adanya pembalikan beban pembuktian atau yang dikenai dengan sistem pembuktian terbalik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

b. Peradilan *In absentia*

Secara khusus perdailan ini merupakan peradilan terhadap tindak pidana dengan permasalahan sulit untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Banyaknya alasan terdakwa untuk hadir di muka persidangan sampai dengan adanya indikasi pembangkangan dan melarikan diri membuat setiap majelis hakim sulit menyelesaikan perkara pidana seperti ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di perbaharui Undang-Undang No.21 Tahun 2001 pengaturan sistem peradilan ini diatur pada Pasal 38 yang berbunyi bahwa:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang disita;

- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding;
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Walaupun peradilan ini dianggap sebuah peradilan yang bersifat eksepsional terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan di muka sidang pengadilan, akan tetapi peradilan ini memiliki alasan yang jelas untuk menyidangkan dan melaksanakan peradilan *in absentia* tersebut.

Alasan-alasan atau unsur-unsur yang termuat dalam peradilan *in absentia*, antara lain:

1. Karena terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri;
2. Adanya usaha pembangkangan dari terdakwa (misalnya melarikan diri); atau
3. Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (pasal 38 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di perbarui Undang-Undang No.20 Tahun 2001).

Lebih lanjut pemaparan unsur-unsur diatas, dalam hal mengenai proses penyidikannya, peradilan ini tetap berlandaskan kepada proses penyidikan yang berdasarkan pada KUHAP, tidak serta merta

mengesampingkan hak-hak terdakwa untuk mendapat segala jenis informasi dan pemberitahuan dari majelis hakim soal perkembangan kasus sampai dengan pada saat persidangan di buka serta jatuhnya putusan. Di mana hal in juga tetap dibuka jalan atau upaya hukum untuk melakukan banding atas putusan tersebut, sesuai pasal 38 ayat (4) Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang di perbaharui 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “terdakwa atas kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud ayat (1)”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya peradilan in absentia ini merupakan sebuah peradilan dimana bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum atas ketidakjelasan terhadap sejumlah kasus korupsi yang dengan permasalahan sulit menghadirkan terdakwa di muka persidangan serta mengembalikan keuangan Negara.

Keberadaan peradilan in absentia bisa dikaji dari tiga sisi. Sisi pertama memandang peradilan in absentia sebagai bagian dari asas-asas peradilan yang adil. Sisi kedua melihat peradilan in absentia sebagai bagian dari perlindungan HAM dalam sistem Administrasi Peradilan Pidana (The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice). Sedangkan sisi ketiga, Peradilan in absentia sebagai lembaga hukum akan bersentuhan dengan asas-asas ekstradisi.

Asas-asas peradilan yang adil membentang mulai dari saat investigasi dilakukan sampai dengan digelarnya peradilan secara terbuka, termasuk proses banding, kasasi serta peninjauan kembali, sehingga keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini mencakup perlindungan hak pada tahap-tahap pra peradilan (pre trial stage), tahap proses peradilan (the actual trial stage) dan tahap pasca peradilan (post trial stage). Di bawah ini adalah hak-hak yang harus dilindungi pada masing-masing tahap yang telah sebagaimana dijelaskan yahya harahap³¹ sebagai berikut:

1. Tahap Pra Peradilan

- a Larangan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang;
- b Hak untuk mengetahui alasan penahanan;
- c Hak untuk mendapat jasa pengacara;
- d Hak untuk hadir di hadapan hakim untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan;
- e Larangan penyiksaan dan hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi selama masa penahanan pra peradilan;
- f Larangan penahanan incommunicado (yang memutuskan hubungan dengan orang lain).

2. Tahap Peradilan

- a Akses yang sama di hadapan pengadilan;

³¹Yahya harahap. Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: sinar grafika. Jakarta, 2006 hal 134

- b Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil (a fair hearing);
- c Hak untuk mendapatkan pemeriksaan public (a public hearing);
- d Hak untuk diadili pada pengadilan yang tidak memihak, independen, dan kompeten sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e Hak untuk mendapatkan perlakuan praduga tak bersalah;
- f Hak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan tuduhan pidana;
- g Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang memadai untuk persiapan penahanan;
- h Hak untuk memeriksa para saksi;
- i Hak untuk mendapatkan penerjemah;
- j Larangan melibatkan seseorang yang memberatkan;
- k Larangan penerapan hukum-hukum pidana yang berlaku surut;
- l Larangan dalam bahaya yang berlipat (double jeopardy).

3. Tahap Pasca Peradilan

- a Hak untuk mengajukan peninjauan;
- b Hak untuk mendapatkan ganti rugi karena kesalahan peradilan.

Dalam kerangka tahapan diatas, peradilan in absentia berkaitan erat dengan butir 2 (l) di atas mengenai the rights to defend oneself in person or through legal counsel. Dalam hal ini terjadi pro dan kontra antara

yang menolak peradilan in absentia (NGO's dan Statuta Roma) dan yang mendukung (Human Rights Committee-HRC). Yang terakhir ini menegaskan bahwa peradilan in absentia dibolehkan dalam kondisi tertentu jika negara dipandang telah cukup melakukan usaha untuk menginformasikan terdakwa tentang proses peradilan yang akan berlangsung, sehingga memungkinkan melakukan persiapan pembelaan mengenai perlindungan HAM di dalam Administrasi Peradilan Pidana, hal ini mencakup lingkup yang sangat luas dan seringkali juga bersentuhan dengan asas-asas peradilan yang adil di atas. Promosi dan perlindungan HAM mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- a Pencegahan diskriminasi;
- b Asas legalitas;
- c Non warga negara dan pengungsi;
- d Hak untuk hidup dan bebas dari hukuman yang kejam dan tidak wajar;
- e Hak untuk mendapatkan hak dan kebebasan sebagai tahanan;
- f Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil;
- g Administrasi peradilan remaja (Administration of Juvenile justice);
- h Kebijakan peradilan pidana;
- i Tata tertib;
- j Hak (korban) untuk mendapatkan pengobatan;

k Prosedur untuk menyampaikan keluhan dan laporan (complaints and reporting procedures);

l Derogasi

m Kerjasama internasional dalam hal-hal pidana, termasuk perjanjian-perjanjian (treaties model).

Dalam ruang lingkup ini peradilan in absentia berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan peradilan yang fair, khususnya pasal 14 (3) (d) Konvensi internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mengatur jaminan minimum, dalam hal persamaan secara penuh disebutkan: untuk diadili dengan kehadiran terdakwa dan untuk membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan haknya, jika ia tidak memiliki bantuan hukum; dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk untuknya dalam hal dimana peradilan membutuhkannya, tanpa dibayar jika ia tidak mampu membayarnya.

Mengenai hal di atas Human Rights Committee of the international Covenant on Civil and Political Rights memberikan komentar sebagai berikut:

Tertuduh atau pengacaranya harus dibenarkan bertindak sungguh-sungguh dan tanpa rasa takut dalam melakukan pembelaan dan hak untuk menguji keabsahan peradilan jika mereka percaya (peradilan) tidak melakukan dengan adil. Jika peradilan in absentia dilakukan karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan, hak-hak pembelaan tertuduh harus tetap diperhatikan....komisi menetapkan bahwa hak

untuk mendapatkan peradilan secara terbuka tidak melarang tuduhan-tuduhan in absentia. Komisi menyatakan bahwa tuduhan in absentia dibolehkan dalam administrasi peradilan yang tepat, misalnya ketika tertuduh telah diinformasikan mengenai tuduhan-tuduhannya lebih dahulu tetapi kemudian menolak penggunaan haknya untuk hadir.

Putusan yang sah in absentia mengharuskan pengembalian langkah-langkah untuk menginformasikan tuduhan lebih dahulu mengenai tuduhan-tuduhannya, terutama syarat-syarat pada pasal 14 (3) (a): untuk diberitahukan dengan segera dan rinci dalam bahasa yang bisa dimengerti mengenai alasan tuduhan terhadapnya. Tujuan pemberitahuan adalah untuk memberikan kesempatan kepada tertuduh menggunakan haknya secara efektif di bawah pasal 14. Untuk memenuhi tujuan ini, pemberitahuan harus menginformasikan kepada tertuduh mengenai tanggal dan tempat peradilan, dan meminta kehadirannya.”

Di dalam pasal 3 yang mengatur Mandatory Grounds for Refusal huruf (g), ditegaskan hal ini bisa terjadi bila: “keputusan negara yang meminta telah memutuskan in absentia, tertuduh tidak mendapatkan pemberitahuan peradilan yang memadai, atau

Kesempatan untuk mengatur pembelaannya, dan ia tidak memiliki kesempatan lagi agar kasusnya diadili dengan kehadirannya”. Dalam KUHAP, untuk acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak dibenarkan menerapkan peradilan in absentia. Dengan demikian kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan keharusan. Hal ini tersirat dalam

pasal 254 KUHP yang mengatur tentang proses menghadirkan terdakwa dalam persidangan, dan bila perlu dihadirkan secara paksa (pasal 154 ayat 6 KUHP). Persidangan tidak dapat dimulai sampai penuntut umum berhasil menghadirkan terdakwa di persidangan. Sebagai catatan, pengecualian bisa saja terjadi dalam pemeriksaan perkara cepat, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini bisa dilakukan quasi keperdataan dan perkecualian terhadap asas *in absentia*. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan dan ia dapat menunjuk wakilnya.³²

Dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP, atas dasar asas *lex posteriori derogate legi priori* diatur peradilan *in absentia*, seperti UU No.3 Tahun 1971 tentang “emberantasan Tindak Pidana Korupsi” pasal 23 ayat (1), yang kemudian ditegaskan kembali oleh UU penggantinya yaitu UU No.31 Tahun 1999 pasal 38 ayat (1) dalam hal ini dinyatakan bahwa:

Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan dan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.

Sayangnya pengecualian yang signifikan semacam ini tidak disertai dengan standar hukum dan petunjuk umum tentang tata cara untuk melaksanakan peradilan *in absentia*. Petunjuk umum semacam ini bisa disusun oleh Mahkamah Agung, misalnya pernyataan bahwa Mahkamah Agung dapat

³² *Ibid.*, hal 438

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah dikota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan tindak pidana yang diputus secara *in absentia*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan proposal dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Dalam penyusunan proposal ini data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan hakim yang menangani korupsi yang diputus secara *in absentia* di pengadilan Makassar.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literature-literatur, laporan-laporan atau catatan-catatan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan studi dokumen dengan mengumpulkan data yang bersumber pada perundang-undangan, literature-literatur, laporan-laporan atau catatan-catatan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu bentuk penelitian yang difokuskan pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perkara pidana tersebut.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan di analisis secara kuantitatif. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan

menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Di kaitkan dengan Hak-hak Terdakwa (Putusan No 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)

Permasalahan yang sering ditemukan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah dimana tersangka tidak dapat diketahui keberadaannya, meskipun telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan yang termuat dalam hukum acara pidana Indonesia. Peristiwa ini mengakibatkan proses penyidikan menjadi terganggu, dikarenakan tidak efisiensinya waktu penyelesaian penyidikan dan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk menemukan tersangka.

Apabila kondisi ini berlanjut sampai tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka pasal 38 ayat (1) UU TPK memungkinkan dilaksanakannya peradilan *in absentia* yaitu perkara tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Peradilan *in absentia* dimaksud dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah di panggil secara sah atau

patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan semaksimal mungkin³³.

Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap “keluhuran harkat serta martabat manusia” sebagaimana terdapat dalam penjelasan KUHAP³⁴. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP dan penjelasannya telah memberikan pedoman bagaimana hak-hak sipil (hak-hak warga negara) dilindungi dalam proses peradilan pidana. Proses pradilan pidana dilaksanakan berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu merupakan bagian dari HAM. Peradilan harus menjaga bahwa selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila hak-hak tersebut dilanggar³⁵.

Berkaitan dengan pandangan yang menolak diterapkannya peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi karena cenderung melanggar HAM dengan alasan sebagai berikut³⁶:

³³ Marwan Effendy. Peradilan *In Absentia* dan koneksitas, Jakarta, PT Timphani Publshing.2010, hal 61

³⁴ Marjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana kumpulan karangan buku ketiga. Jakarta, pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hal 54

³⁵ *Ibid.*, hal 67

³⁶ Marwan Effendy., *op.cit* hal 72-73

- (1) Hak-hak terdakwa untuk membela diri antara lain sudah diatur dalam pasal 51 dan 52 KUHAP.
- (2) Sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 dimana setiap warga negara di hadapan hukum kedudukannya sama, sehingga walaupun terdakwa melarikan diri seharusnya kewajiban penegakan hukum untuk menghadirkan melalui kerjasama Interpol atau perjanjian ekstradisi atau terdakwa dapat melarikan diri karena tidak segera dikenal, sehingga dalam hal ini aparat hukum perlu berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan terdakwa.
- (3) Penerapan peradilan *in absentia* terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan hak-hak terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dalam pembelaannya di persidangan, yaitu hak untuk membantah (terhadap barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, maupun keterangan saksi), dan hak untuk memberikan tanggapan, meskipun terdakwa masih diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tanpa kehadirannya, karena selama belum ada putusan/vonis dari Hakim, hak-hak asasi terdakwa dijamin oleh hukum dianggap belum bersalah (*asas presumption of innocence*).

Pelanggaran HAM yang dimaksud dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* berkaitan dengan ketentuan pasal 14 konvensi internasional Hak

Sipil dan Politik/*The International Covenant on Civil and Rights* (KIHSP). KIHSP merupakan salah satu bagian dari 3 (tiga) instrument pokok hak asasi manusia. Internasional dalam *International Bill of Human Rights*. KIHSP disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang lebih luas dan penjabaran yang lebih spesifik, seperti misalnya penjabaran hak-hak yang bersifat *non-derogable* dan hak-hak mana yang bersifat *permissible* yang berkaitan dengan hak sipil dan politik³⁷. KIHSP mengandung hak-hak demokratis yang esensial, sebagian besar berkaitan dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan merupakan hal yang harus dihormati oleh Negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan individu. Namun demikian, semua HAM mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warga negaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali yang bersifat absolute. Jadi sebuah negara diperbolehkan membatasi hak seseorang atas privasi absolute ketika negara misalnya melakukan investigasi tindak pidana³⁸.

³⁷ Rhona K.M Smith. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII. 2008, hal 36-37

³⁸ *Ibid.*, hal 93

Pasal 14 KIHSP secara khusus mengatur tentang persamaan di muka pengadilan dan hak atas suatu persidangan yang adil dan terbuka untuk umum yang dilakukan oleh pengadilan yang kompeten, mandiri dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum³⁹. Pasal 14 KIHSP menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.*
- (2) *Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.*
- (3) *Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:*
 - a) *Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;*

³⁹ Marwan Effendy., *op.cit*, hal 69

- b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung, atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f) Untuk mendapatkan bantuan Cuma-Cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
- (4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
- (5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
- (6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
- (7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau

dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing negara.

Kalimat pertama dari pasal 14 ayat (1) KIHSP menandakan pentingnya semua orang harus diberikan tanpa diskriminasi hak yang sama atas akses ke pengadilan. Kalimat kedua pasal 14 ayat (1) KIHSP berkaitan dengan hak atas pengadilan yang fair dan terbuka untuk umum oleh sebuah pengadilan yang kompeten, mandiri dan tidak memihak serta ditetapkan oleh undang-undang selanjutnya dalam pasal 14 ayat (2) dinyatakan tentang asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Ketentuan ini berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan. Asas praduga tak bersalah harus dipertahankan tidak hanya selama persidangan berhadapan dengan terdakwa, tetapi juga berhubungan dengan seseorang atau tertuduh dalam seluruh tahap sebelum persidangan⁴⁰. Pasal 4 KIHSP selanjutnya diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa yaitu antara lain berupa hak:

- (1) Jaminan procedural minimal pemberitahuan dalam penentuan terhadap pidana seseorang;
- (2) Hak atas fasilitas-fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan suatu pembelaan;
- (3) Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

⁴⁰ *Ibid.*, hal 23

- (4) Hak untuk diadili dengan kehadiran terdakwa;
- (5) Hak atas saksi dalam keadaan apapun saksi tidak boleh diperiksa tanpa hadirnya terdakwa maupun pengacara;
- (6) Hak untuk tidak dipaksa dalam memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah (*asas non-self-incrimination*);
- (7) Hak untuk banding.

Hak-hak tersebut dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d KIHSP tersebut telah tercantum dalam Pasal 50 sampai 68 KUHP.

Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 DUHAM menegaskan bahwa pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas dengan syarat diatur dalam bentuk undang-undang⁴¹. Ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 14 KIHSP telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17,18 dan 19 UU HAM. Selanjutnya dalam Pasal 73 UU HAM diatur tentang hak derogasi dimana pasal 17,18 dan 19 UU HAM tidak termasuk *non-derogable rights*.

⁴¹ Romli Atmasasmita., *op.cit*, hal 13

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan tanpa melanggar HAM apabila negara telah menjalankan keharusan mengemukakan alasan-alasan atas ketidakmampuan negara menghadirkan tersangka. Artinya, ketidakmampuan negara dikemukakan dan dibuktikan di depan pengadilan sebagai suatu alasan yang obyektif. Dalam proses dan prosedur pelaksanaan peradilan *in absentia*, harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, terutama berkaitan dengan tata cara melakukan pemanggilan secara layak dan diberitahukan di media massa terhadap tersangka tetapi yang bersangkutan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya⁴². Hal ini sangat penting karena mengingat syarat mutlak dilaksanakannya peradilan *in absentia* adalah: (1) harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Mengenai ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan *in absentia*, di satu sisi KUHAP memberikan hak kepada terdakwa untuk menghadiri sidang pengadilan dan hak tersebut merupakan hak utama terdakwa untuk seluas-luasnya melakukan pembelaan terhadap dirinya, melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Bahkan juga diberikan keleluasan apabila pada waktu persidangan sedang berjalan akan tetapi belum mencapai putusan, terdakwa dapat hadir, maka pada sidang

⁴² Loebyy Loqman., *op.cit*, hal 14

berikutnya pengadilan wajib mendengar dan memeriksa terdakwa. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, persidangan, dilakukan dengan mengacu kepada prinsip persidangan yang sederhana, cepat dan murah, tetapi karena pengadilan juga harus memperhatikan hak-hak terdakwa, maka harus dicari keseimbangan terdakwa dengan kecepatan pemeriksaan yang di tuntut dalam suatu perkara, terutama perkara korupsi⁴³.

Di sisi lain, terdakwa sendiri secara sengaja memang tidak berkeinginan menggunakan haknya yang diberikan KUHP tersebut. Dalam hal ini berarti terdakwa telah memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk membela diri di muka persidangan. Ketidakhadiran terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah merupakan upaya terdakwa secara sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan yang berakibat pada proses pemeriksaan.

Lebih jelasnya tentang peradilan in absentia. Penulis menjabarkan salah satu proses peradilan in absentia pada perkara pidana tipikor No.90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS petikan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

No.90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS

⁴³ Marwan Effendy., *op.cit.* hal 19

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi
Tempat lahir : Soppeng
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/27 Desember 1972
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Pesona Taman Dahlia Blok A/14 RT/RW
01/01 Kel. Mattoangin Kec.Mariso Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi Makassar
Pendidikan : SMA (Tamat)
2. Nama Lengkap : Syarifuddin Ashari
Tempat Lahir : Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/05 September 1965
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Paccerakang Kompleks BTN Mangga Tiga
Blok C2 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan :Karyawan pada PT.Aditya Rezki Abadi
Makasssar (Manager Operasional)

Pendidikan : S1

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan

Menimbang

Bahwa terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.Adtya Rezki Abad (PT.ARA) Makassar sesuai dengan akta pendirian perusahaan No.43 tgl 11 januari 2002 dan terdakwa II Syarifuddin Ashari selaku Manajer Operasional PT.Aditya Rezki Abadi (PT.ARA), bersama-sama dengan abdurachman salamah (almarhum) selaku kepala PT.Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Syariah Makassar dan saksi Muh. Nasir selaku penyedia Operasional PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari tanggal yang tidak ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar jalan Boulevard Ruko Jasper II No.34 dan di kantor PT. Adtya Rezki Abadi (PT.ARA) jalan Sultan Alauddin No.123 Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena para Terdakwa sejak di tingkat penyidikan telah dipanggil sebagai tersangka secara patut menurut undang-undang, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut tanpa hadirnya terdakwa yang telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi selaku direktur PT.Adtya Rezki Abadi, pada tahun 2005 telah mengajukan permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor kepada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehubungan dengan adanya produk pemberian pembiayaan

kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaannya mempedomani surat Edaran Direksi PT.Bank Tabungan Negara (persero) Nomor: 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pembiayaan Multiguna BTN Syariah dan standar Operating Procedure pembiayaan multiguna BTN syariah (SOP).

2. Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor pada BTN Syariah, maka pada tahun 2005 sampai dengan 2008 terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku direktur PT.Adtya Rezki Abadi, memerintahkan terdakwa II Syarifuddin Ashari selaku Manajer Operasional dan saksi Andi Basri Esa selaku Manajer Marketing, mencari pihak lain yaitu orang perseorangan yang bersedia membantu PT.Adtya Rezki Abadi (PT.ARA) untuk menjadi pihak yang seolah-olah sebagai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mobil, selanjutnya terdakwa II Syarifuddin Ashari melaksanakan perintah terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan cara meminjam identitas calon nasabah berupa kartu tanda penduduk (KTP). Kartu keluarga (KK), surat nikah dan pas foto,(dengan imbalan per-orang Rp 700.000,-sampai dengan Rp. 1.500.000,-) untuk diajukan ke bank BTN Syariah. Bersama dengan identitas calon nasabah tersebut, PT Adtyah Rezki Abadi juga melampirkan dokumen yang seakan-akan isinya dibuat benar berupa:
 - Foto kopi Surat Keputusan (SK) bagi karyawan

- Surat keterangan dari instansi bagi karyawan
 - Surat keterangan penghasilan/slip gaji bagi karyawan
 - Surat keterangan usaha (siup/TDP) bagi wiraswasta
 - Surat keterangan penghasilan dari pihak kelurahan bagi wiraswasta
 - Surat permohonan/form permohonan pembiayaan
 - Membuka tabungan di BTN Syariah
 - Penawaran unit kendaraan dari dealer/showroom
 - NPWP bila pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp. 100.000.000,-
3. Bahwa keseluruhan dokumen yang diajukan oleh PT Aditya Reski Abadi ke bank BTB Syariah sejumlah 785 calon nasabah, harus dilakukan verifikasi oleh bagian *financing service officer* (FSO) yaitu saksi Yayat Hidayat dan Muh. Afif walaupun pada kenyataannya tugas tersebut diambil alih oleh saksi Muh. Nasir, SE atas sepengetahuan Abbdurhman Salamah (almarhum) selaku kepala Bank BTN Syariah, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi, diloloskan seolah-olah telah dilakukan verifikasi.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi dan terdakwa II Syarifuddin Ashari tersebut bertentangan dengan *standar operating procedures* (SOP) Surat Edaran Direksi PT.Bank Tabungan

Negara BTN (Persero) Nomor: 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005, yaitu aplikasi dan persyaratan calon nasabah harus melalui tahapan verifikasi, wawancara dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan oleh *Finnance Service Officer*.

4. Bahwa dari 785 calon nasabah yang diajukan oleh terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 72.049.787.175,- ternyata diantaranya terdapat 493 orang adalah nasabah fiktif, karena selain dokumen tersebut diatas, masih terdapat dokumen lain yang dijadikan jaminan ke bank sebagai syarat pencairan dana pembiayaan saja, padahal diketahui dokumen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dokumen tersebut diantaranya:

- Surat pernyataan mengenai ketersediaan mobil yang ditandatangani oleh terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku direktur PT Adtya Rezki Abadi, sedangkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari PT Adtya Rezki Abadi kepada nasabah, ditandatangani oleh terdakwa II Syarifuddin Ashari seolah-olah kendaraan tersebut telah diserahkan kepada nsabah.
- Surat permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi bersama terdakwa II

Syarifuddin Ashari kepada tujuh (7) dealer (PT .AAA; PT.AAJ; PT.Johar; PT.HK; PT SPI 77; dan PT.Surandar).

5. Bahwa setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku direktur PT.Adtya Rezki Abadi disetujui oleh Bank BTN Syariah Cabang Makassar, dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan kendaraan dan sebagai penyedia kendaraan, terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi diisyaratkan membuat cover note yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Bank BTN syariah Cabang Makassar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak akad pembiayaan multiguna BTN Syariah ditandatangani, namun pada kenyataannya pembiayaan kendaraan bermotor sejak periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terdapat 587 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur kepemilikan kendaraannya yang oleh terdakwa I Djusmin Dawi bin Semi , tidak diserahkan ke Bank BTN Syariah.
6. Bahwa terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku direktur PT.Adtya Rezki Abadi bertanggung jawab penuh atas pembayaran angsuran pembiayaan nasabah tersebut mulai dari awal pembiayaan sampai dengan pembiayaan pelunasan, kenyataannya angsuran yang telah disetor melalui PT.Adtya Rezki Abadi .oleh terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi tidak disetor ke Bank BTN Syariah

melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa I Djusmin Dawi sendiri.

7. Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dan terdakwa II Syarifuddin Ashari , dilakukan secara terus-menerus sejak tahun 2005 s/d tahun 2008 sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 44.199.462.000,-(empat puluh empat milyar seratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHA1-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara pemeriksaan tingkat Penyidikan dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka majelis memperoleh fakta bahwa pada tahap penyidikan dimana terdakwa-terdakwa masih berstatus tersangka ternyata terdakwa-terdakwa tidak pernah hadir dan tidak pernah diperiksa oleh jaksa penyidik, sehingga sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap ketidak hadiran terdakwa-terdakwa di dalam pemeriksaan di siding pengadilan ini manapun ketidakhadirannya dalam status tersangka-terdakwa pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat asas hukum yang

menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, asas mana dianut pula dan dijabarkan lebih lanjut dalam KUHAP yang mengatur hukum acara pidana sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Umum angka 3e;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas dan ketentuan hukum tentang penyelenggaraan proses peradilan yang cepat sebagaimana tersebut diatas , yang untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum ketidakhadiran terdakwa-terdakwa dalam tahap penyidikan pada saat statusnya masih sebagai tersangka sehingga terdakwa-terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan , maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena jabatannya (*ex officio*) hakim berwenang menjatuhkan putusan sehubungan dengan penyidikan dan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum tanpa kehadiran terdakwa-terdakwa tersebut dengan dasar pertimbangan agar pemeriksaan terhadap pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mengambil putusan tentang tindakan hukum penyidikan dan/atau penuntutan umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa tersebut telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang tersusun secara subsidaritas yaitu:

Primair: Telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire: Telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa-terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah penyidikan dan/atau penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil suatu penyidikan dan/atau penuntutan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHP pada dasarnya yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka-tersangkanya, sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 menentukan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dimungkinkan tanpa kehadiran terdakwa-terdakwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, dalam hukum acara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, pada dasarnya penjelasan umum dan ketentuan Pasal 164 dan 196 KUHAP menyatakan bahwa kehadiran terdakwa-terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan Hakim merupakan suatu keharusan, namun demikian khusus untuk perkara tindak pidana korupsi Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyediakan proses pengadilan *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa-terdakwa) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah di panggil secara sah tetapi tidak dapat hadir di pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya, ketentuan tersebut merupakan eksepsional/pengeualian dari hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa menurut majelis, ketentuan mengenai Peradilan *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa-terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 harus diartikan bahwa pengadilan *in absentia* hanya berlaku dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan dan tidak dapat diterapkan dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Artinya ketidahadiran terdakwa-terdakwa dalam proses peradilan perkara Tindak Pidana Koupsi hanya dapat dibenarkan pada

tahap pemeriksaan pengadilan. Sedangkan ketidakhadiran tersangka-tersebut pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dimungkinkan dalam arti penyidikan haruslah melaksanakan perintah hukum untuk tetap memeriksa tersangka-tersebut dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka-Tersangka.

Menimbang, bahwa pandangan majelis tersebut dilandasi oleh pemikiran dengan menggunakan metode penafsiran teologis, gramatik dan otentik yang diakui didalam hukum pidana Majelis menggunakan penafsiran teologis dengan berusaha mengerti dan memahami maksud dan tujuan para pembuat Undang-Undang merumuskan pasal perihal peradilan *in absentia* tersebut, sedangkan melalui penafsiran gramatikal dan otentik yang mendasarkan pada struktur/tata bahasa bunyi kalimat dalam pasal, maka rumusan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 maupun penjelasannya yang secara tegas menyebut dengan istilah “terdakwa” yang telah dipanggil secara sah dan tidak hadir pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya, menurut Majelis dengan memberi penekanan dan perhatian pada frase “terdakwa”, sidang pengadilan dan frase dapat diperiksa dan diputus secara nyata telah mengindikasikan bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud dan berkehendak untuk mengatur bahwa ketidakhadiran terdakwa-

terdakwa dalam proses hukum perkara tindak pidana korupsi hanya diperbolehkan dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak pada tahap penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena menurut Majelis Undang-Undang Tindak pidana korupsi tidak mengatur ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan proses hukum penyidikan dan/atau penuntutan tanpa kehadiran tersangka-terdakwa/terdakwa dalam tahap penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur lain maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan KUHAP, sehingga sesuai dengan ketentuan KUHAP, Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa-terdakwa pada tahap penyidikan sebagai tersangka-terdakwa diperiksa dengan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka-Tersangka.

Menimbang, bahwa lebih dari itu peradilan *in absentia* hanya dapat dilakukan apabila terdakwa-terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi terdakwa-terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai Berita Acara Pemeriksaan terdakwa-terdakwa, ternyata terdakwa-terdakwa tidak pernah di periksa selama proses penyidikan, maka Majelis tidak dapat mengetahui apakah ketidakhadiran Terdakwa-Terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan atas kemauan terdakwa-terdakwa sendiri atau bukan, sehingga Majelis berpendapat bahwa kepadanya diberikan hak untuk didengar keterangannya dan karena itu pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka-terdakwa pada tahap penyidikan merupakan keharusan/wajib.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis hakekat pengadilan *in absentia* bagi tindak pidana korupsi, terutama adalah bukan dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi supaya segera ada ketetapan hukum yang merugikan negara itu. Hukum pidana bukan alat balas dendam tujuan paling utama dan penting dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan negara adalah agar hartanya segera disita dan dikembalikan kepada negara untuk dikelola sebaik mungkin agar bisa dimanfaatkan oleh negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak asasi tersangka-terdakwa dan/atau terdakwa-terdakwa, hal mana sesuai dengan penjelasan KUHAP sebagai

Hukum Acara Pidana yang merevisi hukum Acara Pidana lama yang diatur dalam HIR yang lebih mengedepankan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka-tersebut atau terdakwa-terdakwa pada setiap tahap proses hukum pidana, lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa konsep *due process of law* (peradilan yang cermat dan adil) tetapi harus diterapkan Majelis menyadari bahwa proses hukum terhadap pelaku tindak pidana harus tetap dilakukan, akan tetapi jangan sampai dilanggar hak asasinya. Terdakwa-terdakwa harus tetap didengar keterangannya pada tahap penyidikan sebagai tersangka-tersebut. Dalam *due process of law* itu Jaksa sebagai Penuntut Umum harus bisa mengungkapkan fakta hukum dan pandangan-pandangan mengapa seseorang tersangka/terdakwa bersalah bisa dihukum. Sebaliknya tersangka/terdakwa bisa membantah jika dirinya memang tidak bersalah lewat fakta dan pandangan hukum. Dan dua versi hukum tersebut barulah pengadilan akan bisa menentukan putusannya, apabila sama sekali tidak diketahui keterangan-keterangan tersangka pada tahap penyidikan. Maka pengadilan akan sulit untuk memperoleh kebenaran hakiki, padahal pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan mendengar kedua belah pihak (*audit et alteram partem*), objektif dan tidak memihak serta mendapatkan kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa menurut hukum tindakan penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai tersangka dan tidak dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka-Tersangka belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga adalah patut dan adil apabila hak penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan tanpa menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka-Tersangka belum lengkap dan seharusnya belum saatnya diajukan proses penuntutan maka untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mencari, menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka-terdakwa serta untuk dapat mengetahui, menyita dan menyelamatkan harta negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai terdakwa-terdakwa, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan pula untuk melengkapi berkas perkara melalui upaya yang lebih keras dan sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan terdakwa-terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa-terdakwa dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang; bahwa oleh karena penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 26 dan Pasal 38 yat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pidana Korupsi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 angka 3 dan angka 7 KUHAP serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bundle fotokopi (legalisir) Stndard Operating Procedurees (SOP) BTN Syariah;
 - b) 1 (satu) bundle fotokopi (legalisir) Surat Edaran Direksi BTN Syariah No:6/DIR/DSYA/2005, tanggal 5 April 2005;
 - c) 1 (satu) bundle fotokopi (legalisir) perjanjian kerjasama pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN kantor cabang Syariah Makassar dengan PT Adtya Rezki Abadi No.557, tanggal 28 Februari 2006;

- d) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) permohonan ijin pembuatan Kantor Cabang Syariah, No.7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) ketetapan direksi No. 05/DIR/DSYA/2005 tentang Pembukaan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar, PT BTN (Persero), tanggal 11 April 2005; dst tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari: Selasa, tanggal 05 April 2013 oleh: Wayan Karya, SH. M.hum sebagai hskim ketua, Tardi, SH dan Mas'ud, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari: senin,tanggal 11 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota,dibantu siahaineia Neeltje panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut,serta dihadiri pula oleh Andi Mujahida SH penuntut umum tanpa hadirnya terdakwa-terdakwa".

B. Relevansi Peradilan In Absentia Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan

Peradilan *in absentia* menjadi sebuah permasalahan yang unik untuk dibahas baik dari segi legitimasi yuridisnya, hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai peradilan *in absentia*, eksistensi sampai pada tahap pelaksanaan peradilan dengan hubungannya hak-hak terdakwa sebagai solusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan pasal 38 ayat 1 (satu), memperbolehkan adanya peradilan secara *in absentia* atau tanpa di hadir terdakwa.

Berdasarkan asas hukum yang dianut negara ini maka, asas hukum *Lex specialis derogate legi generally* (Undang-Undang Khusus mengesampingkan Undang-Undang Umum), *Lex posteriori derogate legi priori* (Undang-Undang yang baru disahkan akan menghilangkan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu dalam hal ini KUHAP jika terjadi pertentangan antara keduanya) serta interpretasi sistematis (dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan lain lebih tinggi kedudukannya yang dapat di jadikan dasar hukum) mengenai peradilan *in absentia*.

Dalam wawancara dengan Abdul Razak, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 2 Maret 2015, menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan Peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di muka kemungkinan dilaksanakannya peradilan *in absentia* dalam hal terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Akan tetapi prosesnya, terdakwa tetap harus di panggil di persidangan sesuai yang diisyaratkan Pasal 154 KUHP.” Lebih lanjut, Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1), antara lain karena terdakwa tinggal atau pergi keluar negeri; adanya usaha pembangkangan dari terdakwa (misalnya melarikan diri); atau terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah.

Persoalan Penerapan peradilan secara *in absentia* memerlukan adanya perhatian dan tinjauan khusus yang betul-betul rinci agar diperoleh kebenaran dan kepastian baik dari segi legitimasi yuridis. Hal ini ditegaskan oleh Abdul Razak, dengan penjelasannya bahwa:

“Seyogyanya redaksi tentang persidangan *in absentia* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Hukum Acara Pidana direvisi dimana proses tidak dimulai dan hanya berlaku untuk proses pemeriksaan di persidangan pengadilan, dengan mengatur ketika berbicara tentang peradilan berarti seluruh prosesnya maka pemeriksaan *in absentia* juga mempertimbangkan dimulainya proses sejak tinggal penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan dijatuhkan pengadilan”

“Pelaksanaan Peradilan *In absentia* ini tetap di jalankan oleh Majelis Hakim walaupun Terdakwanya tidak hadir karena Berita Acara Sudah ada jadi di anggap sah dan patut untuk di jatuhkan hukuman. Mengenai hak-hak terdakwa dengan hubungannya terhadap putusan sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa sendiri yang menghilangkan hak-haknya sendiri karena sudah di panggil secara patut selama 3 kali pemanggilan tetapi tidak pernah memenuhi panggilan, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan sampai di tahap persidangan, jadi untuk memenuhi asas cepat proses peradilan tetap di jalankan walaupun tanpa kehadiran terdakwa.

Selanjutnya jika di cermati lagi pada putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi No.90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS dimana pertimbangan majelis menegaskan bahwa peradilan *in absentia* hanya berlaku untuk proses yang *in absentia*nya dimulai pada tingkat pemeriksaan peradilan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, pada dasarnya penjelasan umum dan ketentuan Pasal 164 dan 196 KUHP menyatakan bahwa kehadiran terdakwa-terdakwa dalam persidangan dan pembacaan Putusan Hakim merupakan suatu keharusan, namun demikian khusus untuk perkara Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyediakan proses pengadilan *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa-terdakwa) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah di panggil secara sah tetapi tidak dapat hadir di pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya, ketentuan tersebut merupakan eksepsional dari Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, ketentuan mengenai Peradilan *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus diartikan bahwa pengadilan *in absentia* hanya berlaku di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak dapat diterapkan dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Artinya ketidakhadiran terdakwa-terdakwa dalam proses peradilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dibenarkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan ketidakhadiran tersangka-tersangka pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dimungkinkan dalam arti penyidikan haruslah melaksanakan perintah hukum untuk tetap memeriksa tersangka-tersangka dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka-Tersangka”

Akan tetapi Yahya Harahap menjabarkan tentang putusan yang diucapkan dihadapan terdakwa yang tidak hadir sebagai berikut:

“Putusan yang diucapkan dihadapan terdakwa yang tidak hadir dengan sendirinya mengikat dan berkekuatan hukum tetap yang terhadap terdakwa tidak hadir sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 196 (2), yang mengatakan “setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun tidak hadir”. Dari lanjutan Penjelasan ini, pembuat Undang-Undang mengajak Pengadilan dan Terdakwa menerapkan Prinsip Peradilan yang cepat dan sekaligus mendidik masyarakat, khususnya terdakwa untuk berpikir realistis.”

Maka, dengan demikian tanpa hadirnya terdakwa pun putusan dapat diucapkan mengikat dan berkekuatan hukum yang mengikat terhadap diri terdakwa yang tidak hadir dalam Putusan. Maka dilihat dari penjabaran kasus diatas dapat diberikan suatu garis besar dimana KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan cukup solusi demi efisiensi peradilan pidana khususnya peradilan tindak pidana korupsi demi menjaga asas peradilan cepat, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih besar kepada masyarakat secara umum.⁴⁴

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai hak pembelaan terdakwa atau peradilan yang fair dan adil dimana peradilan ini dianggap bersifat eksepsional atau berat sebelah, karena peradilan ini menghilangkan hak terdakwa melakukan pembelaan di muka sidang pengadilan. Mengenai permasalahan tersebut di atas *Human Rights Committee of the International Covenant on Civil and Political Right* memberikan komentar sebagai berikut:

“Tertuduh dan pengacaranya harus dibenarkan bertindak sungguh-sungguh dan tanpa rasa takut dalam melakukan pembelaan dan hak untuk menguji keabsahan peradilan jika mereka percaya (peradilan) tidak melakukan dengan adil. Jika peradilan *in absentia* dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, hak-hak pembelaan tertuduh harus tetap diperhatikan.....komisi menetapkan bahwa hak

⁴⁴ Yahya Harahap, pembahasan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 380

untuk mendapatkan peradilan secara terbuka tidak melarang tuduhan *in absentia*. Komisi menyatakan bahwa tuduhan *in absentia* dibolehkan dalam administrasi peradilan yang tepat, misalnya ketika tertuduh telah diinformasikan mengenai tuduhan-tuduhannya lebih dulu tetapi kemudian menolak penggunaan haknya untuk hadir. Putusan yang sah *in absentia* mengharuskan pengambilan langkah-langkah untuk menginformasikan tertuduh terlebih dahulu mengenai tuduhan-tuduhannya, terutama syarat-syarat pada dahulu mengenai tuduhan-tuduhannya, terutama syarat-syarat pada ps.14 (3) (a): untuk diberitahukan dengan segera dan rinci dalam bahasa yang bisa dimengerti mengenai alasan tuduhan terhadapnya. Tujuan pemberitahuan adalah untuk memberikan kesempatan kepada tertuduh menggunakan haknya secara efektif di bawah Pasal 14. Untuk memenuhi tujuan ini, pemberitahuan harus menginformasikan kepada tertuduh mengenai tanggal dan tempat peradilan, dan meminta kehadirannya.”

Olehnya karena itu melihat kompleksnya beberapa permasalahan tentang sistem peradilan ini maka, sangat penting dimungkinkan untuk adanya standar yuridis serta tata cara pelaksanaan melihat kemungkinan terjadinya viktimisasi terhadap tiga dimensi kepentingan dalam peradilan *in absentia* diatas. Pedoman semacam ini harus bisa menjawab:

1. Hakekat peradilan *in absentia* sebagai *ex parte* hearing dalam konteks sistem peradilan pidana;
2. Peradilan *in absentia* merupakan peradilan perkecualian dengan syarat-syarat yang jelas (*reasonable cause* sebagai bagian *minimumguarantees*)
3. Apakah peradilan *in absentia* hanya berkaitan dengan sidang pengadilan ataupun bisa juga mencakup ketidakhadiran terdakwa

dalam keseluruhan proses sistem peradilan pidana (mulai penyidikan sampai dengan sidang pengadilan). Dengan kata lain apakah dimungkinkan penyidikan *in absentia* sehingga menghasilkan dakwaan fiktif (fictional indictment);

4. Sampai seberapa jauh hakim dapat menolak kehadiran penasehat hukum dalam peradilan *in absentia*, lebih-lebih apabila terdakwa *in absentia* diancam dengan pidana berat;
5. Sampai seberapa jauh dimungkinkan terjadinya persidangan ulangan, sehingga yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Merujuk hal diatas, Djoko Sarwoko menjelaskan:

“Putusan *in absentia* terhadap terdakwa yang sengaja melarikan diri (itikad buruk), jika diberikan hak banding seyogyanya hadir sendiri (tidak boleh diwakili kuasa). Dari segi pemberantasan Tipikor, ketentuan mana tidak menguntungkan, karena akan mendorong para pelaku melarikan diri, dan akan tetap mendapat perlindungan hukum serta hak upaya hukum sama dengan yang hadir dipersidangan.”

Dengan kata lain dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan pemanggilan tetap merujuk pada aturan yang sudah ada yaitu KUHAP pasal 145 yang diatur secara rinci syarat-syarat sahnya pemanggilan yang intinya terdakwa tetap mendapat pemberitahuan kepada tertuduh mengenai tanggal

dan tempat peradilan, serta meminta kehadirannya kecuali secara suka rela ia mau melepaskan hak pembelaannya.⁴⁵

Dalam wawancara dengan Abdul Razak, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 2 Maret 2015 menegaskan bahwa:

“Mengenai konsekuensi terdakwa yang tidak hadir maka hak untuk melakukan pembelaan sebagaimana terdakwa pada pidana ketika hadir dalam persidangan dianggap tidak dipergunakan dan harus sepenuhnya mengikuti eksekusi putusan majelis hakim pada persidangannya.”

Kemudian tentang hak terdakwa yang wajib diberitahukan oleh ketua majelis hakim pada sidang perkara pidana sehubungan dengan penjatuhan putusan pemidanaan disamakan dengan terdakwa yang hadir dijelaskan yahya harahaap sebagai berikut:

“Pada Pasal 196 ayat (3) membebankan kewajiban kepada ketua sidang untuk memberitahukan segala sesuatu apa yang menjadi haknya sehubungan dengan putusan pemidanaanyang diucapkan. Pemberitahuan segala hak-hak terdakwa diberitahukansegera setelah hakim ketua sidang mengucapkan putusannya. Maksud dari pemberitahuanitu agar terdakwa mengetahui haknya; agar dapat memilih upaya apa yang akan ditempuh sehubungan dengan putusan pemidanaan yang baru diucapkan.”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan dan beberapa penjabaran diatas bahwa setiap terdakwa apapun itu mengenai hadir atau tidaknya seorang yang didakwa bersalah haruslah memperhatikan hak serta kewajiban setiap

⁴⁵ Djoko Sarwoko, Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Badlig MA RI, 2014 hal 36

⁴⁶ *Opcit.*, yahya harahap. Hal 382

majelis untuk menjelaskan tentang bagaimana tindak dan petunjuk cara melanjutkan pembelaannya. Apakah melalui proses yang lebih jauh atau menerima dan mengakui kesalahan terdakwa yang di vonis bersalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*) dimana hak-hak pelaku tindak pidana dilindungi dan merupakan bagian dari HAM. Salah satu hak dimaksud adalah hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d KIHSP. Pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi seakan-akan telah melanggar hak tersebut. Dengan menggunakan asas derogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KIHSP merupakan hak asasi yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 26 DUHAM yang menegaskan bahwa pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas, dalam hal ini adalah hak negara, dengan syarat diatur dalam bentuk undang-undang. Ketidakmampuan negara untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan harus ditemukan dan dibuktikan sebagai alasan yang obyektif. Hal ini sangat penting dikarekanakan syarat mutlak

dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* adalah (1) harus dipanggil terlebih dahulu secara sah, dan (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah.

2. Dalam peradilan *in absentia* terdakwa tetap memiliki hak pembelaan di persidangan sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi karena ketidak-hadirannya terdakwa dianggap mengabaikan hak pembelaannya sebagai konsekuensi *in-absentia* pada proses pemeriksaan sidang pengadilan sehingga dalam hal pemidanaannya dikesampingkan tentang ketidakhadiran terdakwa serta memproiritakan menjalankan putusan sebagaimana putusan bisa yang dihadiri terdakwa demi menjaga prinsip peradilan cepat. Juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hak-haknya sebagai individu.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya aturan yang lebih terperinci tentang aturan pemeriksaan perkara pidana pada rancangan KUHAP yang baru tidak hanya terbatas pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sehingga hal ini dimungkinkan untuk

memidanakan pelaku yang melarikan diri atau berada dalam daftar pencaharian orang dimana proses hukumnya bukan hanya pada langkah pengembalian asset Negara yang diambilnya melainkan proses pemedanaannya juga tetap berjalan.

2. Seharusnya ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana direvisi dengan mengatur bahwa *in absentia* itu dimulai sejak tingkat penyelidikan, penyidikan hingga proses pemeriksaan pada persidangan tidak terfokus hanya pada proses pemeriksaan sidang pengadilan seperti yang ada pada saat ini. Selanjutnya, dengan aturan yang terperinci tersebut akan menghindari terjadinya perdebatan antara penasehat hukum atau *tedakwa* dengan penuntut umum, karena tentunya syarat atau unsur-unsur peradilan *in absentia* lebih secara spesifik beserta penjelasannya. Sehingga, pada setiap proses pemeriksaan dimana *terdakwa* tidak hadir majelis hakim dalam memutus perkara lebih menjaga dan memperhatikan hak-hak *Terdakwa* demi terwujudnya prinsip hukum yang berkeadilan tidak hanya kepada korbannya tetapi terhadap pelaku yang masih memiliki hak sebagai individu di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Saleh. 2008. Bukan kampung maling, bukan desa ustadz. Jakarta : Kompas media nusantara.
- Andi Hamzah. 1986. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta : Erlangga.
- . . 2005. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- . . 2010. Pemberantasan Korupsi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Darwint Prints. 2002. Tindak Pidana Suap dan Money Politic. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- . . 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Edi Wibowo. 2009. Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.279 Februari).
- Evi Hartanti, 2012. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kurniawan L (ET AL) .2003. Menyingkap Korupsi di daerah. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Lilik Mulyadi. 1996. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: PT. Citra Adhya.
- Loebby Loqman. 1996. Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.
- Mien Rukmini. 2007. Perlindungan HAM melalui Asas tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia. Bandung : PT. Alumni.
- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarata: Sinar Grafika.
- . .2012. Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta :sinar grafika

Nurdjana IGM. 2005. Korupsi dan Praktek Bisnis, Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Korupsi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Partantanto Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya : Arkola.

Romli Atmasasmita. 2008. Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi Pengembalian Aset Kejaksaan Internasional dalam Konvensi PBB. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

R. Tresna. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Simorangkir J.C.T . 2000. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi